

BAB III

PERMASALAHAN *INTERNALLY DISPLACED PERSONS* (IDPs) DI AFRIKA

Dalam bab III ini penulis membahas apa itu *Internally Displaced Persons* (IDPs), bagaimana isu *Internally Displaced Persons* menjadi permasalahan utama di kawasan Afrika dan bagaimana kondisi dari para individu dan kelompok masyarakat yang menyandang status sebagai *Internally Displaced Persons* (IDPs).

A. Definisi IDPs (*Internally Displaced Persons*)

Internally Displaced Persons (IDPs) adalah seorang atau sekelompok orang yang terusir dari tempat tinggalnya secara paksa, hal-hal yang menjadi faktor terusirnya dari tempat yang mereka tinggali adalah terjadinya konflik bersenjata, kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM ataupun terdapatnya konflik internal yang terjadi di wilayah tempat mereka tinggal yang dimaksud dengan konflik internal yaitu seperti terjadinya konflik antar pemerintah dengan masyarakat, atau terjadinya pemberontakan, yang dimana hal yang telah disebutkan di atas terjadi dan berimbas pada rusaknya infrastruktur umum, rumah warga, hilangnya lapangan pekerjaan dan fasilitas penunjang lainnya (Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah,).

Lalu apa bedanya pengungsi dengan IDPs itu sendiri, IDPs adalah orang-orang yang terusir dari tempat yang mereka tinggali atau wilayah domisili mereka secara terpaksa dan memilih untuk menetap dinegara asal mereka, dengan alasan mereka tetap memilih menetap dinegara asal maka mereka di sinilah letak perbedaannya IDPs dengan pengungsi, yang dimana pengungsi memilih untuk keluar atau melewati batas negara dan memilih untuk menetap di negara-negara sekitar baik itu berjangka panjang maupun pendek. sehingga ketika seseorang atau sekelompok orang yang terusir dari tempat yang ditinggalinya secara terpaksa dan tidak melakukan pelarian

yang melawati batas negara secara hukum internasional maka mereka dikategorikan sebagai *Internally Displaced Persons* atau IDPs. Pada masa berakhirnya Perang Dingin ditahun 1991 telah meninggalkan sebuah fakta yang menyita perhatian komunitas internasional, yaitu terjadinya peningkatan dari jumlah penyandang IDPs di dunia, yang layaknya kita ketahui bahwa dari terjadinya Perang Dingin ini di latar belakang oleh adanya perbedaan ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang pada akhirnya menyeret banyak negara-negara didunia untuk ikut andil dalam menentukan sekutu mana yang harus mereka pilih atau mereka menjadi pihak *non-block* yaitu tidak memihak pihak mana pun dalam perang ideologi ini.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari perang ideologi ini dari masing-masing kubu yaitu Amerika Serikat dengan ideologinya Demokrasi dan Uni Soviet dengan ideologinya komunis saling berebut wilayah untuk menanamkan ideologi-ideologi yang ingin mereka sebar, dengan terjadinya perebutan wilayah pengaruh ideologinya masing-masing kubu telah memicu terjadinya banyak konflik di berbagai negara yang mengakibatkan banyak korban meninggal, rusaknya tempat tinggal dan fasilitas umum. Peperangan yang menggunakan kekuatan militer memang masih menjadi faktor terbesar dalam menyumbang angka penyandang IDPs didunia akan tetapi Selain apa yang terjadi dari sebuah peperangan, konflik internal atau konflik bersenjata terdapat juga faktor lain yang memiliki peran besar dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan jumlah penyandang IDPs yaitu faktor bencana alam. Mengapa faktor bencana alam menjadi salah satu faktor penyumbang jumlah IDPs terbanyak ini dikarenakan bencana alam adalah sebuah faktor yang tidak dapat dicegah atau diprediksi oleh manusia dan ini telah menjadi faktor dalam kurun waktu yang lama.

Maka dari itu dengan terdapatnya banyak faktor yang mempengaruhi pertambahan angka penyandang IDPs di dunia seperti dinamika di dalam ranah politik, frekuensi terjadinya bencana dan banyaknya konflik di negara-negara yang rentan akan stabilitas politiknya telah menyumbang angka untuk jumlah penyandang IDPs baru setiap tahunnya. Penanganan

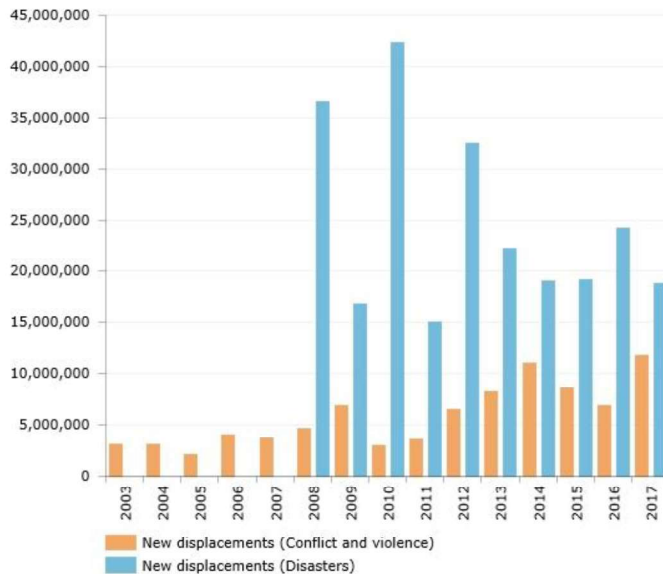
dalam permasalahan IDPs masih di nilai lamban dikarenakan beberapa faktor seperti perpindahan para penyandang IDPs sering melakukan perpindahan ke wilayah-wilayah yang sulit untuk di jangkau oleh komunitas internasional, pemberian bantuan, sulitnya fokus negara yang memiliki warga negara IDPs dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada para penyandang IDPs dan negara tidak adanya stabilitas politik pemerintah atau otoritas terkait dalam menyelesaikan permasalahan IDPs karena masih kurangnya alat hukum yang memberikan perlindungan dan solusi secara komprehensif. permasalahan ini semakin memburuk dikarenakan para IDPs ini tidak secara langsung mendapatkan perlindungan internasional karena status keberadaan mereka yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah negara asal. Ini merupakan posisi yang sulit bagi IDPs dikarenakan mereka adalah individu yang rentan terhadap perlindungan di area konflik dan mengalami kendala dalam menerima bantuan kemanusiaan dan perlindungan dalam situasi konflik.

Over the past decade, the number of internally displaced people in the world has grown substantially but they are largely beyond the regular mechanisms of the international community. Statistics and information about their conditions are sorely needed so that strategies can be developed to protect and assist them.
(Deng, 1998)

Tercatat dari badan *Internal Displacement Monitoring Center* atau IDMC mencatat perkembangan yang telah terjadi dalam kurun beberapa tahun belakangan ini terkait IDPs seperti jumlah IDPs secara global, pertumbuhan IDPs dari tahun ke tahun yang terbagi dalam kategori *Violence, disaster* dan *conflict*. Di penghujung tahun 2017, setidaknya sekitar 40 juta orang tercatat sebagai penyandang IDPs akibat dari konflik dan kekerasan di 57 negara dan 1 wilayah yang menjadi fokus

IDMC. Selain itu IDMC mencatat sekitar 8.5 juta orang berada dalam kondisi yang sangat rentan dalam keselamatan mereka, dengan timbulnya kesadaran mereka terhadap kondisi mereka yang rentan dalam situasi konflik, permasalahan dalam mendapatkan perlindungan dan pemberian bantuan kemanusiaan untuk penyandang IDPs dikarenakan mereka melakukan perpindahan dari wilayah yang memiliki potensi besar dalam konflik sehingga dapat mengancam kehidupan mereka ke wilayah yang dinilai lebih aman bagi mereka, yang dimana ancaman itu datang dari negara asal mereka, dengan mendapatkan ancaman dari asal negara mereka dari itu para IDPs melakukan perpindahan lokasi mereka tinggal sebagai solusi sementara yang dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari area konflik demi keselamatan dan keamanan mereka. Dengan melihat terancamnya kondisi dari IDPs, IDMC masih terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dari para IDPs dari waktu ke waktu sembari melakukan pengkajian dalam menemukan solusi terbaik untuk dapat memberikan bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh penyandang IDPs di negara-negara yang tercatat memiliki IDPs.

Gambar 3.1 Data Jumlah IDPs di Afrika



Source : <http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data>

Dalam kurun waktu 2017, telah tercatat bahwa setidaknya 30.6 juta penyandang IDPs baru di 135 negara di dunia, dan terbagi ke dalam 11.8 juta orang yang menyandang *Internally Displaced Persons* yang diakibatkan oleh konflik di 57 negara dan 18.8 juta orang lainnya tercatat menjadi *Internally Displaced Persons* yang di akibatkan oleh bencana alam di 134 negara. Sebagai sebuah lembaga, IDMC menyediakan data IDPs di hampir semua negara di dunia dari tahun ketahunya dengan membuat sebuah platform yang dapat memudahkan setiap orang dalam mengakses data di platform yang telah disediakan oleh IDMC, data-data tersebut dilengkapi dengan berbagai macam data tidak hanya jumlah penyandang IDPs di

setiap negara tetapi juga penyebab dari IDPs juga secara lengkap. (IDMC, 2018)

B. Mengapa isu *Internally Displaced Person* (IDPs) menjadi permasalahan

Dengan isu *internally displaced persons* menjadi isu yang menyita perhatian *United Nation* (UN), komunitas internasional telah menyadari terlebih dahulu mempersiapkan dirinya dalam menghadapi ataupun menyikapi tantangan yang diberikan oleh isu *internally displaced persons* bagi komunitas internasional. Jauh sebelum isu ini menjadi isu yang menyita perhatian UN organisasi seperti Palang Merah Internasional atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) telah jauh lebih dulu memiliki mandat dalam isu ini sendiri dan masih banyak organisasi lainnya baik itu organisasi pemerintah ataupun non-pemerintah memulai untuk memperluas ruang lingkup gerak mereka ke dalam isu *internally displaced persons*. Dan beberapa pemerintah pun mulai lebih responsif dalam menanggapi isu *internally displaced persons* dalam memberikan perlindungan dan bantuan internasional bagi yang terkena dampak, bagaimanapun ini merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah di negara yang memiliki penyandang IDPs dan sekarang beberapa pemerintah mulai terbuka atau membuka diri untuk meminta bantuan dari komunitas internasional seperti organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah untuk dapat menutupi kekurangannya sebagai aparatur negara dalam memberikan perlindungan yang dapat menjamin para IDPs di negara mereka, yang pada dasarnya ini merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi untuk memberikan perlindungan bagi penyandang IDPs dinegara mereka.

Selain permasalahan multidimensional, dalam konflik bersenjata, perlindungan dan pemberian bantuan internasional bagi penyandang IDPs kurang terintegrasi dengan memaksimalkan kerjasama yang terjalin di antara pemerintah

dan otoritas yang berkaitan serta organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah. akan tetapi terdapat permasalahan lain yang luput dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan komunitas internasional yaitu kurangnya norma hukum yang disediakan untuk dapat memberikan perlindungan dan penyelesaian permasalahan bagi isu *internally displaced persons*, sehingga tindakan, kebijakan dan perlindungan yang hendak diberikan untuk menangani isu IDPs masih jauh dari kata komprehensif. Melalui situasi seperti ini PBB pun menyadari pentingnya mencari sebuah solusi secara politik yang tepat terhadap konflik agar dimasa depan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penambahan jumlah penyandang IDPs, sehingga tugas dari PBB tidak hanya berkisar di area penjaga perdamaian akan tetapi juga turut mempromosikan pemberian perlindungan individu, memantau pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM, memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan dan mempromosikan solusi yang berjangka panjang yang dimana di dalam pemberian solusi jangka panjang ini terdapat re-integrasi, pengembangan dan terjadinya transisi menuju nilai-nilai demokrasi. Namun dengan tujuan yang telah direncanakan ini oleh PBB dan Francis Deng tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dukungan dengan pemahaman penuh dari pemerintah dan otoritas yang memiliki kepentingan.

Dengan mengingat bahwa jumlah dari individu *internally displaced persons* di dunia tidak sedikit dan lebih memiliki peluang risiko yang lebih besar dari pengungsi, ini dikarenakan mereka tak kunjung menemui kejelasan dalam kekuatan hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka secara pasti. Dengan hilangnya tempat tinggal individu yang terkena dampak dari terdapatnya konflik internal, konflik bersenjata, dan seringnya banyak dari individu penyandang IDPs ini masih terjebak di tengah-tengah wilayah konflik serta berada di jalur-jalur yang mereka gunakan sebagai jalur pelarian ditengah-tengah konflik yang berlangsung mereka mendapatkan risiko lainnya seperti terkena dampak dari penggunaan senjata selama

konflik, terjadinya kekerasan fisik dan traumatis mental. Dalam melakukan pelarian para individu IDPs ini memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk tidak membawa dokumen apapun bersama mereka yang dimana ini termasuk ke dalam dokumen identitas mereka, dengan tidak berdokumennya para penyandang IDPs ini mereka memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Ketika para penyandang IDPs ini melakukan pelarian secara tidak langsung mereka telah memiliki jalur-jalur yang sering digunakan dalam kasus konflik baik itu bersenjata atau tidak sering kita dengar bahwa para pengungsi dan IDPs ini dikumpulkan kemudian direkrut secara paksa untuk di jadikan militer, dijadikan tahanan, dan mendapatkan kekerasan seksual selama dalam masa konflik, dengan melihat potensi ancaman yang seperti apa yang dapat diterima oleh para IDPs ataupun pengungsi dapat meninggalkan pasca trauma baik secara fisik maupun mental. Pusat pengendalian penyakit Amerika Serikat melaporkan bahwa tingkat kematian di kalangan *Internally Disolaced Persosn* atau IDPs memiliki kemungkinan 60 kali dari yang tidak termasuk ke dalam kategori IDPs, jadi dapat dikatakan bahwa para individu yang menyandang IPDs memiliki potensi angka kematian tertinggi didunia. (Deng, 1998)

Ironisnya banyak dari orang lain berpendapat bahwa dengan para penyandang IDPs ini lebih memilih menetap di negara mereka masing-masing, meski telah terusir dari tempat tinggal telah hancur oleh konflik yang terjadi di area atau wilayah mereka tinggal, maka para individu atau kelompok *Internally Displaced Persons* atau IDPs ini akan mendapatkan perlindungan yang terjamin. Sayangnya ini tidak berlaku di kebanyakan negara salah satunya seperti di Afrika, mengapa Afrika ini dikarenakan Afrika masih belum memiliki kebijakan yang bersifat komprehensif dan koheren atau kerangka hukum untuk mengatasi permasalahan IDPs. Meskipun Afrika memiliki serangkaian undang-undang yang dapat mereka

gunakan untuk menangani permasalahan isu *internally displaced persons*, kemungkinan besar hal-hal tersebut tidak memiliki dampak yang secara langsung secara fokus dapat menangani permasalahan IDPs untuk dapat memastikan terjaminnya perlindungan dan penyediaan bantuan internasional untuk individu atau kelompok IDPs.

Mengapa para penyandang IDPs ini tidak meninggalkan negara asal mereka dan memilih menetap dinegara asal mereka. Yaitu dikarenakan untuk beberapa penyandang IDPs yang lebih memilih menetap dan tinggal dekat dengan rumah dan sanak saudara mereka adalah memiliki harapan bahwa konflik ataupun permasalahan yang sedang mereka hadapi akan segera usai, sehingga mereka dapat langsung kembali dengan sesegera mungkin ke tempat tinggal mereka untuk dapat membangun tempat tinggal dan segera berkumpul kembali dengan sanak saudara mereka yang masih berada di negara mereka. Pemikiran lainnya adalah, mereka merasa tidak perlu untuk melakukan perjalanan yang akan sama bahayanya jika mereka memilih tinggal di negara mereka ini dikarenakan mereka tidak memiliki sejumlah keberanian dan terdapat ketakutan dan faktor lainnya adalah terkait dengan keterbatasan kekuatan fisik mereka yang diakibatkan selama terjadinya konflik seperti terluka, cacat dan menderita sakit yang berakibat pada melemah atau berkurangnya mobilitas mereka dalam sehari-hari. (Kibaba, 2018)

Setelah penjabaran permasalahan di atas mengapa isu IDPs ini menjadi suatu permasalahan yang harus ditanggapi dan menerima penanganan yang serius dari komunitas internasional, Afrika telah dikenal sebagai sebuah benua yang rentan akan konflik bersenjata, bencana alam, kelaparan, perdagangan manusia hingga menjadi benua dengan jumlah penyandang IDPs terbanyak di dunia

Berdasarkan faktanya bahwa IDPs sering ditemukan di wilayah-wilayah terpencil atau negara-negara kecil, dengan

jumlah yang sangat sulit untuk ditentukan. Dengan susahnyanya data ataupun memiliki sumber yang baik dalam menggambarkan kondisi dari IDPs ini adalah dengan menggunakan data dari *Internal Displacement Monitoring Center* atau yang lebih sering disebut IDMC dan lembaga *Norwegian Refugee Council* atau yang lebih sering dikenal dengan NRC. Dari organisasi-organisasi menyimpulkan bahwa di akhir tahun 2016, terdapat 12.6 juta jiwa yang menyandang status sebagai IDPs di kawasan Afrika. Mereka jika telah merilis sebuah laporan yang menggambarkan keadaan dari para individu yang menyandang status sebagai IDPs di kawasan Afrika. Laporan terbaru yang telah dikeluarkan oleh organisasi ini pun menyatakan bahwa di enam bulan pertama tahun 2017 tercatat bahwa terdapat tambahan jumlah IDPs di kawasan Afrika sebanyak 2.7 jiwa.

Jika total angka tersebut ditotalkan jumlah dari *Internally Displaced Persons* di kawasan Afrika saja hampir mencapai setengah dari total jumlah penyandang IDPs di seluruh dunia, setengah dari jumlah mereka berada hanya di dua negara, yaitu dengan total jumlah kurang dari 1,000,000 jiwa *Internally Displaced Persons* berada di *Democratic Republic of Congo*, dan selebihnya yaitu sekitar lebih dari 200,000 jiwa menjadi *Internally Displaced Persons* di wilayah Republik Afrika Tengah. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir ini. (Campbell, 2018)

Gambar 3.2 Data Update Jumlah IDPs

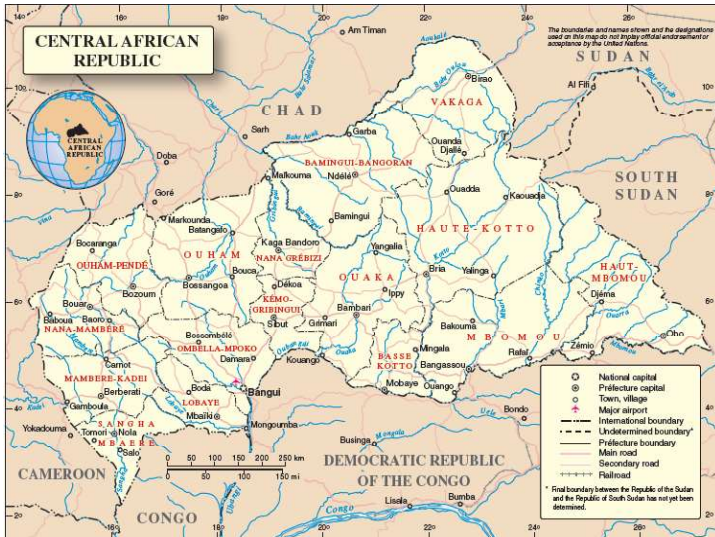


(Source : Internal Displacement Monitoring Center)

C. Kondisi dari isu *Internally Displaced Persons* (IDPs) di kawasan Afrika

Merujuk dengan pemaparan dari kondisi *Internal Displacement* sebelumnya bahwa telah terjadi peningkatan jumlah yang signifikan di kawasan Afrika yaitu sebesar 2.7 juta jiwa di 6 bulan pertama tahun 2017, melalui penjabaran total jumlah penyandang IDPs ini negara yang memiliki persentase terbanyak dengan jumlah yang mendekati angka 1.000.000 jiwa adalah *Democratic Republic of Congo* dan *Central African Republic* yang mencapai jumlah penyandang IDPs sebanyak lebih dari 200.000 jiwa. *Central African Republic* (CAR) adalah kawasan yang memiliki potensi konflik yang tinggi, jika dilihat dari catatan sejarah yang ada bahwa CAR terhitung memiliki jumlah penyandang IDPs yang tidaklah sedikit dan mengalami peningkatan jumlah individu *internally displaced persons* yang signifikan.

Gambar 3.3 Peta Central African Republic



Sources : <http://www.mapnall.com>

1. Latar Belakang Republik Afrika Tengah

Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara bagian dari benua Afrika dalam beberapa d *Central Afrika Republic* atau yang biasa disebut sebagai CAR, dengan total luas negara sebesar 622.984 km² dengan total populasi sebanyak 5.000.000 penduduk. Dengan total jumlah penduduk sebanyak 5.000.000 jiwa CAR juga kaya akan keberagaman etnis dan agama yang data dibagi dalam persentase sebagai berikut ; Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma 4%, dan lainnya 2%. Untuk agama, 35% merupakan penganut keyakinan Adat, Protestan 25%, Katolik Roma 25%, dan Muslim 15%. Semenjak *Central African Republic* memperoleh kemerdekaannya ditahun 1960, hampir di semua era pergantian kepemimpinan CAR melalui proses kudeta militer,

pemberontakan ataupun konflik internal lainnya. Pada akhirnya pemilu pertama adu CAR dapat dilaksanakan pada tahun 1993 dengan kemenangan dalam pemilu dimenangkan oleh Age-Felix Patasse, yang menjadi lawan Age-Felix Patasse pada saat pemilu saat itu adalah Andre Kolingba dan David Dacko yang diaman kedua calon pemimpin CAR adu pemilu saat itu pernah menjabat sebagai pemimpin CAR sebelumnya namun mereka mengalami penolakan dari masyarakat Republik Afrika Tengah. Setelah Age-Felix Patasse berkuasa selama 1 dekade Age-Felix Patasse menerima ancaman kudeta dari Jenderal Francois Bozizes yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, yang diketahui gerakan kudeta yang dilakukan oleh Francois Bozizes mendapatkan dukungan dari negara tetangga CAR yaitu Chad.

Internal Displacement Monitoring Center atau yang lebih dikenal dengan IDMC, skala dari krisis *internal displacement* di *Central African Republic (CAR)* atau Republik Afrika Tengah adalah wilayah atau daerah yang mencapai peringkat tertinggi di awal mula IDMC masuk ke wilayah Afrika untuk melakukan *monitoring* terhadap individu atau kelompok yang menyandang status *Internallay Displaced Persons* atau IDPs ditahun 2003. Tercatat lebih dari 390,00 orang di *Central African Republic (CAR)* belakang ini tercatat telah kehilangan tempat tinggal mereka, data dari jumlah angka penyandang IDPs baru menunjukkan bahwa jumlah ini adalah dua kali lipatnya dari jumlah yang telah dilaporkan direntang taun 2006-2008.

Melalui apa yang telah dipaparkan di atas terkait adanya ketidakstabilan politik dan kesamaan di CAR telah memberikan peningkatan angka di setiap tahunnya, sebuah perkiraan menunjukkan sebuah hal yang diluar ekspektasi sekitar 10 persen dari total jumlah penduduk

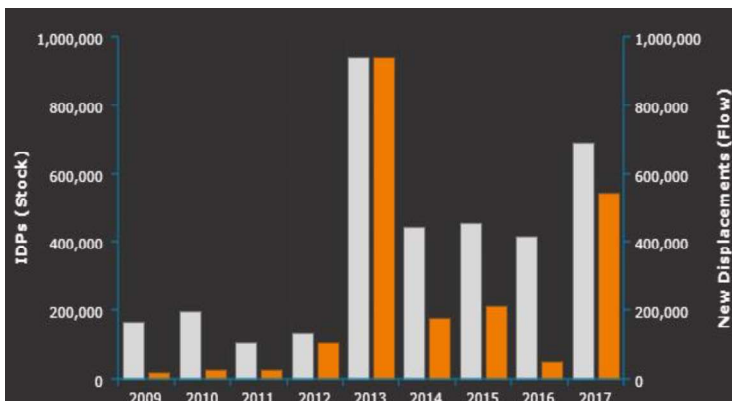
di *Central African Republic* secara terpaksa harus meninggalkan atau melarikan diri dari tempat tinggal mereka. Salah satu konflik yang dapat dijadikan patokan ketidakstabilan politik dan konflik yang memiliki dampak yang besar dalam menyumbang kerusakan serta peningkatan jumlah penyandang IDPs di Afrika Tengah.

Pergerakan Séléka, pergerakan kudeta militer adalah pergerakan yang ditunjukkan untuk menggulingkan Presiden Bozize dan rezimnya yang berkuasa pada saat itu. Pada posisi ini CAR memiliki situasi yang serupa dengan apa yang terjadi di Columbia, negara dengan jumlah penyandang *internal Displacement* terbanyak didunia dengan 11 persen penduduknya hidup sebagai *Internally Displaced Persons* (IDPs). Dalam konteks umum seperti lemahnya hukum dan perlindungan secara hukum, terdapatnya kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan pemberontakan, pergerakan selesa untuk menjatuhkan pemerintah di CAR, hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai alasan utama dari para individu di CAR kehilangan tempat tinggal dan terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal mereka karena wilayah atau area yang mereka tinggali tidak aman dan mendapatkan tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat CAR. Banyak dari para pejuang tidak mendapatkan bayaran atas apa yang telah mereka kerjakan berminggu-minggu hingga hitungan bulan yang pada akhirnya mereka malah menjarah para warga dengan mengambil barang bawaan mereka, melakukan pemerkosaan hingga melakukan pernikahan yang secara terpaksa, ancaman-ancaman yang mengarah kepada IDPs tidaklah berhenti di situ saja perekrutan anak-anak untuk dipersiapkan ke dalam konflik pun ikut mengalami peningkatan. (IDMC, 2018)

2. Kekerasan yang terjadi di Republik Afrika Tengah

Konflik yang terjadi di *Central African Republic* atau CAR telah memberikan dampak tidak satbilannya bagi negara tetangganya, khususnya di antara Chad dan Sudan, keduanya telah melakukan sebuah tindakan yang mendukung kelompok bersenjata dari pihak oposisi untuk menggulingkan rezim yang berkuasa dimasa lalu. Laporan baru-baru ini menyatakan bahwa warga Chad dan Sudan terlibat dalam pertikaian di wilayah CAR, bersamaan dengan laporan terbaru dari jumlah pengungsi yang telah mencapai di wilayah CAR yang berimbas dari terjadinya perang diwilayah Darfur di Sudan, merujuk pada masih adanya ancaman dari kelompok-kelompok bersenjata diwilayah perbatasan dengan bermaksud untuk memanfaatkan keadaan dengan memperpanjang konflik yang terjadi.

Gambar 3.4 Jumlah IDPs di Central African Republic



Sources : <http://www.internal-displacement.org/countries/central-african-republic>

3. Ketidakpastian dalam adanya peran Internasional terkait IDPs di kawasan Afrika

Di suatu negara yang dimana angka kemiskinannya memiliki penurunan melalui dukungan layanan publik, IDPs di *Central African Republic* (CAR) tengah dihadapkan dengan krisis kemanusiaan yang berada di tahap yang memprihatinkan, terutama dalam bidang pemberian kebutuhan mendasar seperti akses kesehatan, makanan, air bersih, dan sebuah pemukiman sementara bagi para individu atau kelompok penyandang IDPs. Mengawatirkannya lagi, sektor kesehatan telah menjadi permasalahan utama yang menjadi terbesar yang akan di hadapi, ini dikarenakan di luar ibu kota Bagui tidak memiliki tenaga medis profesional yang ada hanyalah para staf bantuan kemanusiaan.

Tantangan yang dimiliki dengan mendapatkan pertolongan dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan namun di saat yang bersamaan juga mengalami kesulitan dalam hal pendanaan adalah 2 kunci permasalahan yang menjadi tantang yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam bidang bantuan kemanusiaan pun memiliki permasalahan yang dihadapi seperti memiliki keterbatasan sumber daya dan ternyata ancaman dapat mengancam para staf penyalur bantuan kemanusiaan, mengapa hal ini dapat di katakan karena menurut laporan adanya serangan langsung yang diarahkan langsung kepada petugas kesehatan. Selama berlangsungnya peristiwa Maret, banyak instansi-instansi yang terkena operasi pelumpuhan oleh para kelompok untuk menjarah persediaan dan gudang kantor instansi tersebut. Dengan melihat kondisi yang kacau seperti itu maka banyak dari para petugas kesehatan dan pemberian bantuan kemanusiaan yang ditari mundur dari wilayah-wilayah rawan akan konflik dan kekerasan.

Meskipun European Union telah menaikkan jumlah dari dana bantuan untuk krisis yang sedang dialami oleh *Central African Republic* atau CAR sebanyak 150 persen, kebutuhan dana untuk setiap organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan belumlah mencapai tahap yang mencukupi, dengan hanya 39 persen dari aktivitas yang mendapatkan pendanaan di awal bulan Oktober. Di samping besarnya kebutuhan dan kekhawatiran yang muncul, hanya 5 persen dana yang dialokasikan untuk program perlindungan.

Dengan semakin kompleksnya krisis yang di hadapi oleh CAR seakan-akan permasalahan ini tidak akan hilang begitu saja. Dan dengan kurangnya keterlibatan secara langsung oleh komunitas internasional dalam permasalahan krisis yang di hadapi oleh *Central African Republic* ini akan semakin menimbulkan kekacauan. Dewan Keamanan PBB tengah membahas terkait bagaimana keadaan CAR, mengingat akan kebutuhan yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan yang kuat dan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para penyandang IDPs yang terjebak dalam konflik di *Central African Republic*, dan negara-negara tetangga di sekitarnya. (Internal Displacement Monitoring Center, 2018).